

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PELAYANAN KOMITE SEKOLAH BERBASIS SUMBANGAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 BANJARMASIN

Widiya Astuti,Murdiansyah Herman,Normajatun

Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska,16120044

Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska,1109127301

Ilmu Administrasi Publik,63201,Fisip,Uniska, 1116116301

Email : widiyafisip@gmail.com

Abstract

WIDIYA ASTUTI, NPM. 16120044 "Implementation of Policies on the Services of School Committees Based on Donations at Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin". Guidance by Murdiansyah Herman as Principal Development and Mrs.Normajatun as Co Supervisor.

The research objective is to find out how the implementation of policies on voluntary school committee services based on Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin.

The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data was collected by documentation and interviews with five informants. The sample is determined using a purposive sampling technique. Data analysis using data reduction, data interpretation, and making conclusions.

The results showed that the implementation of the policy on the contribution of school committee services based on the SMK Negeri 3 Banjarmasin has been going well according to the technical instructions in Permendikbud No.75 of 2016, but there are still some inhibiting factors in the policy that must be corrected in the future.

Keywords: Policy Implementation, Service, School Committees

WIDIYA ASTUTI, NPM. 16120044 “*Implementasi Kebijakan Tentang Pelayanan Komite Sekolah Berbasis Sumbangan Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin*”. Bimbingan Bapak Murdiansyah Herman sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Normajatun sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tentang pelayanan komite sekolah berbasis sumbangan sukarela pada SMK Negeri 3 Banjarmasin.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara kepada lima orang informan. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik sampling purposive. Analisis data menggunakan reduksi data, interpretasi data, dan melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan tentang pelayanan komite sekolah berbasis sumbangan pada SMK Negeri 3 Banjarmasin sudah cukup baik sesuai dengan petunjuk teknis pada Permendikbud No.75 tahun 2016, namun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam kebijakan tersebut yang harus diperbaiki kedepannya.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pelayanan, Komite Sekolah

PENDAHULUAN

Komite sekolah adalah “Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah Nurhadi, (2008:41) dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, (2012:15). Seperti yang dijelaskan pada pendapat Nurhadi tadi bahwa komite ini tidak hanya sebuah nama Organisasi tetapi sebuah gerakan organisasi dalam memberikan

dukungan meningkatkan pelayanan Mutu Pendidikan sehingga tercapainya sebuah tujuan bersama.

Pembentukan Komite Sekolah dapat menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap sekolah. Masyarakat akhirnya berpartisipasi dalam pengembangan sekolah. Di sisi lain, sekolah juga dapat mengurangi ketergantungannya terhadap pemerintah yang banyak mengintervensi proses pembelajaran di sekolah. Komite Sekolah merupakan upaya

dalam memberikan dukungan dan peran masyarakat terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. Mustadi (2015:18) dalam Yusuf, (2015:3) menyatakan bahwa pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah tidak terlepas dari upaya mensinergikan dukungan dan peran serta masyarakat untuk bersama-sama sekolah mengusahakan tercapainya peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara demokratis dan akuntabel dalam rangka tujuan pendidikan nasional.

Bentuk dukungan dari masyarakat meliputi bantuan pendidikan bisa berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya bahkan dari alumni sekalipun juga diperbolehkan untuk menyumbang serta berpartisipasi dalam Peningkatan Mutu Layanan. Syarat yang telah disepakati oleh pihak orang tua seperti Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik baik

perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016 yang berbasis sumbangan sukarela ini merupakan sebuah pemikiran baru dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di Indonesia. Pro dan kontra dalam Permendikbud ini mengakibatkan kesalahpahaman oleh sebagian orangtua siswa dengan adanya perubahan pungutan liar atau bisa disebut iuran bulanan berubah menjadi sumbangan sukarela. Karena sebagian orangtua menganggap bahwa sekolah sudah gratis tidak ada pungutan yang bersifat iuran bulanan. Tetapi di dalam suatu Permendikbud No.75 tahun 2016 menyebutkan bahwa komite sekolah boleh menerima uang/jasa/barang yang sifatnya sukarela untuk mendukung Mutu Layanan Pendidikan yang ada di Sekolah.

Dalam hal ini tujuan bersama dengan Komite SMK Negeri 3 Banjarmasin dalam tugasnya mengimplementasikan

kebijakan, bekerja sama dengan Orangtua wali siswa agar ikut berpartisipasi untuk mendukung pendidikan agar lebih efektif dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan tercapainya tujuan bersama dengan cara mensosialisasikan kepada orangtua siswa. Dengan adanya kebijakan ini orangtua siswa memberikan uang/barang/jasa tanpa ada paksaan. Selain sumbangan berupa uang, ada juga orangtua yang menyumbangkan barang untuk Peningkatan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 3 Banjarmasin.

Sumbangan yang telah dikumpulkan akan dikelola dengan baik dan benar sesuai Anggaran yang tersedia. Dilihat dari sumbangan yang terbatas masih ada anggaran/kegiatan yang belum dapat terlaksana. Implementasi kebijakan tentang

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang bersifat mengikat bagi semua orang seperti yang dikemukakan Normajatun, dkk, (2019:2) Kebijakan bersumber dari usulan seseorang,

Komite Sekolah berbasis sumbangan di SMKN 3 Banjarmasin pada tahun 2018 masih memiliki masalah, dari hasil wawancara dengan Plt.Kepala Sekolah bahwa dana sumbangan komite yang telah dikumpulkan belum bisa memenuhi kegiatan karena keterbatasan dana tersebut sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Disamping itu ada anggaran yang harus menjadi prioritas dalam peningkatan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan deskripsi permasalahan diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan tentang Pelayanan Komite Sekolah Berbasis Sumbangan Di SMKN 3 Banjarmasin”.

kelompok atau pemerintah dalam upaya menyelesaikan hambatan yang menjadi masalah disuatu lingkungan tertentu. Sumber pengusul sangat berperan dalam menetapkan tujuan

dan sasaran yang diinginkannya untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sebuah kebijakan mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kata “kebijakan” (policy) umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi atau privat “Kebijakan” bebas dari konotasi yang dicakup dalam kata politis (Political) yang sering kali diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan “korupsi.” (Lasswell,1921) dalam Parsons, (2014:17). Sedangkan Implementasi Kebijakan merupakan suatu pendukung dalam mewujudkan kebijakan publik sehingga muncul sebuah program yang akan mengatur Kebijakan Publik tersebut dan program tersebut harus di implementasikan karena sudah dibuatnya sebuah kebijakan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan

Van Meter dan Horn dikutip Wibawa,et al.,(1994:15) dalam Maulana, (2019:96)

ALAT DAN METODE

Desain dari penelitian ini mengambil metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang penulis ambil disini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis,faktual,dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian Deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan merupakan pendukung dalam mewujudkan kebijakan publik sehingga muncul sebuah program yang akan mengatur Kebijakan Publik tersebut dan program tersebut harus di implementasikan karena sudah dibuatnya sebuah kebijakan agar memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan Sumbangan Sukarela di SMKN 3 Banjarmasin tidak ditentukan jumlah sumbangan serta tanggal pembayarannya melainkan atas kesepakatan bersama, uang tersebut dikelola oleh petugas yang berada di Loker Sumbangan dan digunakan sesuai dengan RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Serta dalam penggunaan Dana Komite Sekolah tersebut boleh di keluarkan setelah adanya persetujuan dari kepala sekolah dan komite sekolah.

Pelaksanaan Sumbangan Sukarela tersebut sudah ditentukan dalam permendikbud No.75 Tahun 2016 pasal 10 yaitu :

1. Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
2. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada Permendikbud

No.75 tahun 2016 ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

3. Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
4. Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
5. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
 1. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
 2. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
 3. pengembangan sarana prasarana; dan
 4. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus di pertanggungjawabkan secara transparan.

6. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:

1. mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
2. di pertanggungjawabkan secara transparan; dan
3. dilaporkan kepada Komite Sekolah.

Model Implementasi Kebijakan oleh George C.Edward III, mengemukakan 4 Variabel yang mempengaruhi suatu Implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi yang saling berkaitan satu sama lain.

Faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang pelayanan komite sekolah berbasis sumbangan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin.

Terdiri faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi ini adalah Komunikasi,Sumber daya alat, Disposisi (sikap dari pelaksanaan kebijakan tersebut) dan Birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat

yaitu Sumber daya alat berupa mesin hitung dan pendeteksi uang palsu yang belum dapat dibeli karena mengingat pemasukan dana yang sangat minim untuk membeli alat tersebut.

KESIMPULAN

1. Kebijakan tentang pelayanan komite sekolah berbasis sumbangan pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Banjarmasin yang berdasarkan pada Permendikbud No.75 tahun 2016 tentang komite sekolah sudah cukup baik.
2. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Permendikbud No.75 Tahun 2016 pada Komite SMK Negeri 3 Banjarmasin yaitu seperti komunikasi dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh komite sekolah kepada orangtua siswa berjalan dengan lancar setiap diadakannya rapat pertemuan antara komite sekolah dengan orangtua siswa. Terdapat sumberdaya yang mendukung dalam melaksanakan kebijakan tersebut serta

melaksanakan kebijakan sesuai dengan petunjuk teknis. Keterbatasan anggaran dalam mendukung kebijakan tersebut tidak dapat tercover seluruhnya pada komite sekolah sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat direalisasikan seperti mesin pendeteksi uang palsu untuk dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

REFRENSI

Setiawan, N. (2012). *PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER DI SD NEGERI SE-KECAMATAN MUNTILAN*. Universitas Yogyakarta.

Yusuf, F. (2015). *PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN DI SD UNGGULAN AISYIYAH BANTUL*. Universitas Yogyakarta.

Normajatun, S.Malawat, F. Fibriyanita. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana-Kampung Baiman (Kkb-Kb) Di Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 47.

Parsons, W. (2014). *Kebijakan, Pengantar Teori dan Praktik Analisis*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Maulana, D. (2019). *KEBIJAKAN PUBLIK (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik)*.

Permendikbud No.75 Tahun 2016 tentang sumbangan sukarela Komite Sekolah.